

Realokasi Kursi Bukan Menambah Kursi Oleh. Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi

Menambah jumlah kursi DPR menjadi wacana baru dalam formulasi Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu) baru-baru ini. Beberapa fraksi sepakat untuk mengusulkan penambahan kursi mulai dari Fraksi Golkar, PKB, Nasdem, dan juga Gerindra. Partai Gerindra mengusulkan penambahan sepuluh kursi menjadi 570, kemudian PKB mengusulkan jumlah kursi DPR dari 560 menjadi 619. Salah satu argumentasi yang melatarbelakangi usulan penambahan kursi ini ialah munculnya daerah pemekaran baru dan tidak proposionalnya jumlah kursi dengan jumlah penduduk Indonesia. Pertanyaannya sejauh mana urgensi penambahan jumlah kursi parlemen ini?

Salah satu ilmuwan politik Rein Tageepara memang menawarkan formula matematis untuk menghitung besaran jumlah kursi parlemen di suatu negara dengan rumus akar pangkat tiga dari jumlah penduduk disuatu negara atau yang dikenal dengan teori *cube root of population*. Jika menggunakan rumus ini, akar pangkat tiga dari 237.556.363 jumlah penduduk di Indonesia ialah 619 bukan 560. Dengan kata lain, berdasarkan formula ini Indonesia kekurangan 59 kursi DPR.

Meski demikian, jika merujuk pada studi yang dilakukan oleh *The Ace Electoral Knowledge Network* (www.aceproject.org) di 111 negara hanya Norwegia yang jumlah penduduk dengan jumlah kursi DPR sesuai dengan teori *cube root of population*. 169 kursi DPR di Norwegia merupakan akar pangkat tiga dari 4.839.091 jumlah penduduk di Norwegia. Sedangkan 77 negara lainnya memiliki alokasi kursi DPR yang jumlahnya kurang dari akar pangkat tiga dan di 33 negara sisanya mengalami jumlah kursi DPR yang berlebih dari akar pangkat tiga (lihat tabel lampiran).

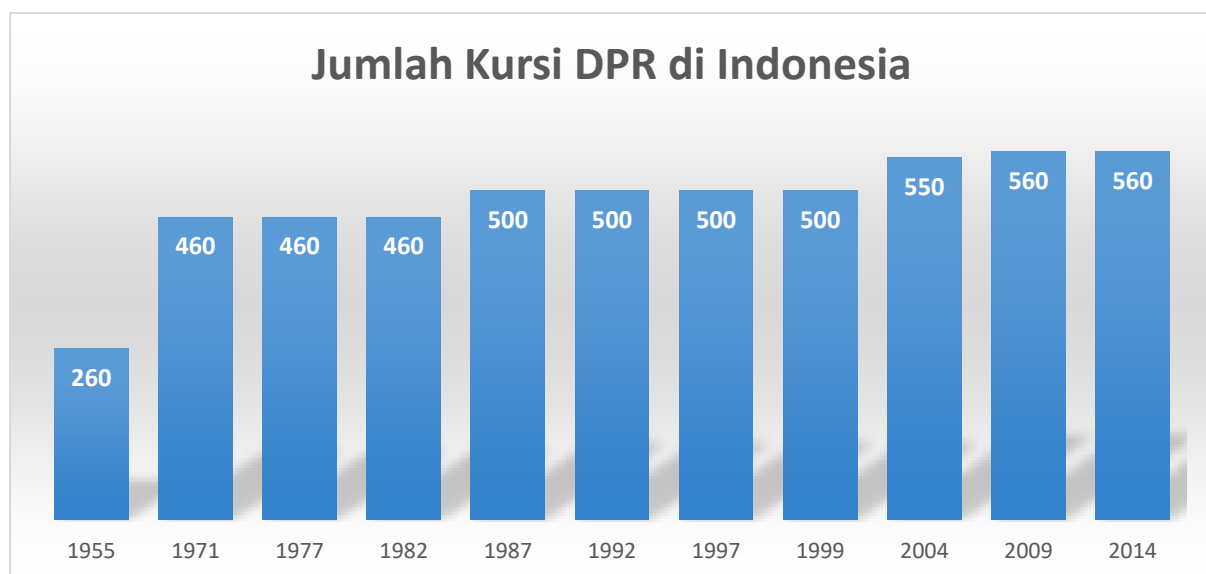
Australia misalnya, memiliki jumlah kursi DPR sebanyak 150 kursi. Padahal jika dihitung berdasarkan akar pangkat tiga dari 21,932,000 jumlah penduduk di Australia, seharusnya terdapat 280 kursi DPR. Dengan kata lain kursi DPR di Australia kekurangan sebanyak 130. Begitu pula dengan India dan Amerika yang memiliki kekurangan kursi DPR jika dikontekstualisasikan dengan teori *cube root of population*.

Dengan jumlah penduduk sebanyak 1.169.850.000, seharusnya India memiliki kursi DPR sebanyak 1054. Akan tetapi realitasnya India hanya mengalokasikan 552 kursi DPR. Amerika Serikat pun demikian. Dengan jumlah penduduk 307.635.000 sepatutnya mengalokasikan 675 kursi di *House of Representatives*. Tetapi berdasarkan *apportionment Act 1911*, kursi DPR di Amerika Serikat ditetapkan berdasarkan *Fixed Seat* dengan jumlah 435 kursi.

Pada sisi lain, terdapat pula beberapa negara yang justru melampaui jumlah kursi yang dihasilkan dari akar pangkat tiga. Jerman misalnya, mengalokasikan 622 kursi DPR. Padahal jika dihitung berdasarkan akar pangkat tiga dari 82.002.000 jiwa penduduk Jerman, sejatinya terdapat 434 kursi DPR di Jerman. Dengan kata lain terdapat 188 kursi DPR berlebih di Jerman. Begitu pula dengan Inggris yang memiliki kursi DPR berlebih sebanyak 255. Jika dihitung dari

rumus matematis Tajeepara semestinya Inggris mengalokasikan kurs DPR sebanyak 395 bukan 650.

Dari sini nampak bahwa formula hitung jumlah kursi akar pangkat tiga yang dirumuskan oleh Rein Tajeepara bukanlah satu-satunya instrumen untuk menentukan jumlah kursi DPR di suatu negara. Melainkan masing-masing negara memiliki otonominya sendiri untuk menentukan indikator-indikator tertentu atau berdasarkan konsesus yang disesuaikan dengan kebutuhan negaranya untuk mengalokasikan jumlah kursi DPR. Konteks sejarah, besarnya negara, geografis, jumlah wilayah administratif, ataupun jumlah pemilih yang terdaftar menjadi indikator lainnya diluar populasi penduduk yang biasa digunakan dalam menentukan jumlah jumlah kursi DPR.



Dalam konteks Indonesia, sejarah mencatat terdapat lima kali perubahan besaran jumlah kursi di DPR sejak Pemilu 1955 sampai dengan Pemilu 2014. Di Pemilu 1955 jumlah kursi DPR sebanyak 260, sedangkan sejak Pemilu 1971 sampai dengan Pemilu 1982 jumlah kursi DPR berubah menjadi 460. Perubahan terjadi pula pada Pemilu 1987 sampai dengan Pemilu 1999 dengan alokasi kursi untuk DPR sebanyak 500. Pada Pemilu 2004 berubah menjadi 550 dan dua pemilu terakhir 2009 dan 2014 berubah menjadi 560.

Meski demikian perubahan jumlah kursi yang terjadi sayangnya tidak disesuaikan dengan proposionalitas alokasi kursi ke provinsi. Sejatinya proposionalitas alokasi kursi ke masing-masing provinsi haruslah terjamin pula. Untuk Pemilu 2014 saja misalnya, masih banyak provinsi yang mengalami *under representated* atau memperoleh kursi yang tidak sesuai dengan jumlah penduduknya dan terdapat pula provinsi yang memperoleh kursi berlebih *over representated* (Lihat tabel lampiran).

Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan Riau merupakan daerah yang mengalami kekurangan kursi. Riau misalnya, dengan jumlah penduduk sebanyak 5.543.031 seharusnya berhak meraih 13 kursi DPR. Pada realitasnya, berdasarkan UU 8/2012 hanya dialokasikan 11 kursi. Begitu pula dengan Jawa Tengah yang seharusnya memperoleh 77 kursi bukan 75 kursi.

Selain itu Provinsi Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Selatan misalnya, justru mendapatkan kursi berlebih. 4.845.998 jumlah penduduk di Sumatera Barat setara dengan 11 kursi DPR bukan 14 kursi. Tidak hanya cukup sampai disitu, selama ini alokasi kursi untuk penduduk Indonesia di luar negeri digabung dengan DKI Jakarta II. Padahal penduduk Indonesia di luar negeri berhak memiliki wakilnya sendiri. Berangkat dari hal tersebut kami beranggapan bahwa:

1. Rumus akar pangkat tiga bukanlah tolak ukur utama untuk merubah jumlah kursi DPR;
2. Menambah jumlah kursi DPR tidak mampu menjawab proposionalitas representasi politik antara warga negara dengan wakilnya terutama di level provinsi;
3. Realokasi kursi DPR ke Provinsi lebih utama untuk dilakukan dalam rangka meningkatkan *linkage* antara rakyat dengan wakil rakyatnya.

Provinsi	Jumlah Sensus Penduduk 2010	Jumlah Kursi Pemilu 2014	Alokasi 3 kursi (34 prov+LN)
Jawa Barat	43021826	91	100
Jawa Timur	37476011	87	87
Jawa Tengah	32380687	77	75
Sumatera Utara	12985075	30	30
Banten	10644030	22	25
DKI Jakarta	9588198	21	22
Sulawesi Selatan	8032551	24	19
Lampung	7596115	18	18
Sumatera Selatan	7446401	17	17
Riau	5543031	11	13
Sumatera Barat	4845998	14	11
Nusa Tenggara Timur	4679316	13	11
Nusa Tenggara Barat	4496855	10	11
Aceh	4486570	13	10
Kalimantan Barat	4393239	10	10
Bali	3891428	9	9
Kalimantan Selatan	3626119	11	9
Kalimantan Timur	3026060	8	7
D I Yogyakarta	3452390	8	8
Jambi	3088618	7	7
Papua	2851999	10	7
Sulawesi Tengah	2633420	6	6
Sulawesi Utara	2265937	6	5
Sulawesi Tenggara	2230569	5	5
Kalimantan Tengah	2202599	6	5
Bengkulu	1713393	4	4
Kepulauan Riau	1685698	3	4
Maluku	1531402	4	4
Kep. Bangka Belitung	1223048	3	3
Sulawesi Barat	1158336	3	3
Gorontalo	1038585	3	3
Maluku Utara	1035478	3	3
Papua Barat	760855	3	3
Kalimantan Utara	524526	0	3
Penduduk LN		0	3
	237556363	560	560

**Perbandingan Jumlah Kursi DPR yang Sudah Ditetapkan dengan
Berdasarkan Teori Akar Pangkat Tiga**

Sumber: <http://aceproject.org/electoral-advice/archive/questions/replies/760379812#357900220>

Country/territory	Actual		Ideal		Difference	
	Population	Lower house (actual legislature size)	Ideal legislature size (cube root of population)	Too many or too few seats in parliament (as compared to the cube root rule)	Actual legislature size as % of ideal legislature size	
Burundi	8,038,618	49	200	-151	24%	
Cambodia	14,805,000	61	246	-185	25%	
Bosnia and Herzegovina	3,767,000	42	156	-114	27%	
Libya	6,420,000	51	186	-135	27%	
Bhutan	3,413,978	47	151	-104	31%	
Barbados	284,589	21	66	-45	32%	
Comoros	798,000	33	93	-60	36%	
Rwanda	9,998,000	80	215	-135	37%	
Antigua and Barbuda	85,632	17	44	-27	39%	
Taiwan (Republic of China)	23,069,000	113	285	-172	40%	
Brunei	388,190	29	73	-44	40%	
Benin	8,791,832	83	206	-123	40%	
Kazakhstan	16,004,800	107	252	-145	42%	
Bahrain	791,000	40	92	-52	43%	
Burkina Faso	15,746,232	111	251	-140	44%	
Belize	307,899	31	68	-37	46%	
Colombia	45,393,050	166	357	-191	47%	
Chile	16,973,000	120	257	-137	47%	
Botswana	1,990,876	61	126	-65	48%	
Belarus	9,671,900	110	213	-103	52%	
Republic of Congo	18,498,000	137	264	-127	52%	
India	1,169,850,000	552	1054	-502	52%	
Australia	21,932,000	150	280	-130	54%	
Mongolia	2,754,685	76	140	-64	54%	
Bangladesh	162,221,000	299	545	-246	55%	
Venezuela	26,814,843	167	299	-132	56%	
Netherlands	16,551,237	150	255	-105	59%	
Bahamas	330,000	41	69	-28	59%	
Bolivia	9,775,246	130	214	-84	61%	
Azerbaijan	8,629,900	125	205	-80	61%	
Israel	7,411,000	120	195	-75	62%	
Pakistan	167,616,500	342	551	-209	62%	
Andorra	86,000	28	44	-16	63%	
Cyprus	793,963	59	93	-34	64%	

Country/territory	Actual		Ideal	Difference	
	Population	Lower house (actual legislature size)	Ideal legislature size (cube root of population)	Too many or too few seats in parliament (as compared to the cube root rule)	Actual legislature size as % of ideal legislature size
Central African Republic	4,422,000	105	164	-59	64%
United States	307,635,000	435	675	-240	64%
Philippines	91,983,000	292	451	-159	65%
Nigeria	162,221,000	360	545	-185	66%
Moldova	3,559,500	101	153	-52	66%
Uruguay	3,318,535	99	149	-50	66%
Cameroon	18,879,301	180	266	-86	68%
Belgium	10,754,528	150	221	-71	68%
Iran	74,196,000	290	420	-130	69%
Sierra Leone	5,696,000	124	179	-55	69%
Tuvalu	10,000	15	22	-7	70%
Slovenia	2,047,009	90	127	-37	71%
Chad	10,329,208	155	218	-63	71%
Scotland	5,168,500	129	173	-44	75%
New Zealand	4,325,900	122	163	-41	75%
Argentina	40,134,425	257	342	-85	75%
Vatican City	800	7	9	-2	75%
Luxembourg	493,500	60	79	-19	76%
Latvia	2,257,300	100	131	-31	76%
Ivory Coast	21,075,000	225	276	-51	81%
Afghanistan	28,150,000	249	304	-55	82%
Angola	18,498,000	220	264	-44	83%
Slovakia	5,413,548	150	176	-26	85%
Russia	141,883,000	450	522	-72	86%
Iraq	31,234,000	275	315	-40	87%
Armenia	3,230,100	131	148	-17	89%
Brazil	191,956,000	513	577	-64	89%
Cape Verde	516,733	72	80	-8	90%
Austria	8,355,260	183	203	-20	90%
Czech Republic	10,476,543	200	219	-19	91%
Indonesia	229,965,000	560	613	-53	91%
Estonia	1,340,415	101	110	-9	92%
Georgia	4,385,400	150	164	-14	92%
Iceland	319,246	63	68	-5	92%
Malta	413,627	69	75	-6	93%
Croatia	4,435,056	153	164	-11	93%
Lithuania	3,349,872	141	150	-9	94%
Republic of Macedonia	2,048,620	120	127	-7	94%

Country/territory	Actual		Ideal	Difference	
	Population	Lower house (actual legislature size)	Ideal legislature size (cube root of population)	Too many or too few seats in parliament (as compared to the cube root rule)	Actual legislature size as % of ideal legislature size
Montenegro	624,000	81	85	-4	95%
Canada	33,802,000	308	323	-15	95%
Albania	3,170,000	140	147	-7	95%
Japan	127,540,000	480	503	-23	95%
Spain	45,929,476	350	358	-8	98%
Norway	4,839,091	169	169	0	100%
Republic of Ireland	4,459,300	166	165	1	101%
Switzerland	7,782,900	200	198	2	101%
Denmark	5,519,441	179	177	2	101%
Morocco	31,993,000	325	317	8	102%
Portugal	10,627,250	230	220	10	105%
Mexico	107,550,697	500	476	24	105%
Egypt	77,420,000	454	426	28	107%
South Africa	49,320,000	400	367	33	109%
Vietnam	85,789,573	493	441	52	112%
Finland	5,346,927	200	175	25	114%
Serbia	9,850,000	250	214	36	117%
Algeria	34,895,000	389	327	62	119%
Thailand	63,525,062	480	399	81	120%
Bulgaria	7,606,551	240	197	43	122%
Democratic Republic of the Congo	68,692,542	500	410	90	122%
Ukraine	46,011,300	450	358	92	126%
Ethiopia	79,221,000	546	429	117	127%
Sudan	42,272,000	450	348	102	129%
Turkey	71,517,100	550	415	135	133%
Greece	11,257,285	300	224	76	134%
Poland	38,100,700	460	336	124	137%
Germany	82,002,000	622	434	188	143%
France	65,073,482	577	402	175	143%
Romania	21,498,616	412	278	134	148%
Italy	60,114,021	630	392	238	161%
United Kingdom	61,634,599	650	395	255	165%
Sweden	9,302,133	349	210	139	166%
Hungary	10,031,208	386	216	170	179%
Nepal	29,331,000	601	308	293	195%
North Korea	24,051,218	687	289	398	238%
People's Republic of China	1,333,370,000	2,987	1101	1886	271%

Pitcairn	50	10	4	6	271%
Cuba	11,177,743	614	224	390	275%